ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji latar belakang Pemerintah Fiji merumuskan kebijakan transisi energi pada tahun 2018, dengan menggunakan tingkat lanskap (*landscape level*) dari *Multi-Level Perspective* (MLP) yang dikembangkan oleh Frank W. Geels sebagai kerangka analitis utama. Sebagai *Small Island Developing State* (SIDS), Fiji menghadapi kerentanan yang tidak proporsional terhadap dampak perubahan iklim meskipun kontribusinya terhadap total emisi gas rumah kaca global kurang dari 0,01%. Sebelum tahun 2018, sistem energi Fiji sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil yang secara konsisten menyumbang sekitar 30% dari total impor barang nasional, sementara dua kebijakan energi terdahulu, *National Energy Policy* (NEP) 2006 dan NEP 2013, belum berhasil mengatasi ketergantungan tersebut maupun mencapai target elektrifikasi dan energi terbarukan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik. Dengan secara sengaja membatasi unit analisis pada tingkat lanskap, penelitian ini mengoperasionalkan empat indikator tekanan eksogen yang berada di luar kendali langsung Pemerintah Fiji, yaitu dampak perubahan iklim berupa siklon tropis dan bencana hidrometeorologi yang berulang, dampak pemanasan global terhadap ekosistem laut dan pesisir, kewajiban normatif Fiji dalam kerangka *Paris Agreement*, dan peran Fiji sebagai Presidensi *Conference of the Parties* ke-23 (COP23) pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat tekanan tersebut saling beririsan secara temporal dan substantif menjelang tahun 2018, dan berinteraksi dengan kerentanan struktural energi domestik Fiji, sehingga menciptakan jendela kebijakan (*window of opportunity*) yang mendorong Pemerintah Fiji merumuskan *Low Emission Development Strategy* (LEDS) 2018-2050 dan *Fiji National Climate Change Policy* (FNCCP) 2018-2030 sebagai respons kelembagaan yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan transisi energi Fiji pada tahun 2018 merupakan produk dari akumulasi tekanan lanskap yang bersifat material sekaligus normatif, yang secara kolektif memperbesar urgensi politik dan ekonomi bagi pemerintah untuk bertindak pada momen tersebut.

Kata kunci: Transisi Energi, Negara Kepulauan Kecil Berkembang, *Multi-Level Perspective*, Fiji

ABSTRACT

This study examines the background of the Fijian Government's formulation of its energy transition policy in 2018, using the landscape level of the Multi-Level Perspective (MLP) developed by Frank W. Geels as the primary analytical framework. As a Small Island Developing State (SIDS), Fiji faces disproportionate vulnerability to the impacts of climate change despite contributing less than 0.01% of total global greenhouse gas emissions. Prior to 2018, Fiji's energy system was heavily dependent on imported fossil fuels, which consistently accounted for approximately 30% of total merchandise imports, while two earlier energy policies, the National Energy Policy (NEP) 2006 and NEP 2013, had not succeeded in resolving this dependency or achieving their stated electrification and renewable energy targets. This study employs a qualitative descriptive method based on secondary data drawn from government policy documents, international organization reports, and academic literature. By deliberately restricting the unit of analysis to the landscape level, this study operationalizes four indicators of exogenous pressure lying beyond the direct control of the Fijian Government: the impact of climate change in the form of recurrent tropical cyclones and hydrometeorological disasters; the impact of global warming on marine and coastal ecosystems; Fiji's normative obligations under the Paris Agreement; and Fiji's role as President of the Twenty-Third Conference of the Parties (COP23) in 2017. The findings show that these four pressures converged both temporally and substantively in the lead-up to 2018, interacting with Fiji's structural domestic energy vulnerability to create a policy window that prompted the Fijian Government to formulate the Low Emission Development Strategy (LEDS) 2018-2050 and the Fiji National Climate Change Policy (FNCCP) 2018-2030 as an integrated institutional response. This study concludes that the formulation of Fiji's 2018 energy transition policy was the product of accumulated landscape pressures, both material and normative, which collectively heightened the political and economic urgency for the government to act at that particular juncture.

Keywords: *Energy Transition, Small Island Developing States, Multi-Level Perspective, Fiji*